

RELEVANSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SEJARAH BANGSA INDONESIA SEBAGAI BENTENG PERSATUAN INDONESIA: STUDI KASUS POLEMIK PENUTUPAN WARUNG DAGING BABI DI KOTA MEDAN 2026

Ananda Almi Fadilah¹, Erika Afrilia Saputri², Intan Rezkinah³, Muhammad Fahrezi⁴, Ramlan Anri Sianturi⁵

¹⁻⁵ Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

*Penulis Korespondensi: almananda57@gmail.com, rika37020@gmail.com,
intanrezkinah32@gmail.com, mhdfahrezi1727@gmail.com, ramlananri@gmail.com

Abstract. Indonesia's progress as a nation with diverse ethnicities, religions, cultures, and languages demonstrates that the country's population possesses a very high level of diversity. Indonesia's social structure, comprised of various ethnic groups, requires Pancasila as its fundamental national law and moral principles to maintain peaceful social interactions. This study aims to examine how Pancasila values function as a unifying force throughout Indonesian history while assessing the ban on pork sales operations in Medan City in February 2026 through an analysis of Pancasila values. This study uses a qualitative research design that utilizes the desk observation method to investigate information from various sources, including books and scientific journal articles, as well as relevant media reports that support the research subject. The research findings indicate that Pancasila values, which include tolerance and human dignity, as well as national unity, collective decision-making, and social justice, serve as important components for maintaining social harmony among diverse communities. Community disputes in Medan City indicate that the implementation of Pancasila social values faces difficulties due to difficulties in understanding government policies and the diverse needs of the community. The Indonesian government and citizens need to strengthen their understanding and practice the values of Pancasila because this will help the nation maintain its unity amidst ongoing social changes.

Keywords: Pancasila, Tolerance, National Unity, Social Conflict

Abstrak. Kemajuan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki beragam suku dan agama dan budaya dan bahasa menunjukkan bahwa penduduk negara tersebut memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Struktur sosial Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis membutuhkan Pancasila sebagai hukum nasional fundamental dan prinsip moralnya untuk menjaga interaksi sosial yang damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai kekuatan pemersatu sepanjang sejarah Indonesia sambil menilai larangan operasi penjualan daging babi di Kota Medan Februari tahun 2026 melalui analisis nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang memanfaatkan metode tinjauan pustaka untuk menyelidiki informasi dari berbagai sumber termasuk buku dan artikel jurnal ilmiah serta laporan media yang relevan yang mendukung subjek penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang meliputi toleransi dan martabat manusia serta persatuan nasional dan pengambilan keputusan kolektif dan keadilan sosial berfungsi sebagai komponen penting untuk menjaga keharmonisan sosial di antara beragam komunitas. Perselisihan publik di Kota Medan menunjukkan bahwa adopsi sosial nilai-nilai Pancasila menghadapi kesulitan karena masyarakat kesulitan memahami kebijakan pemerintah dan beragam kebutuhan masyarakat. Pemerintah dan warga negara Indonesia perlu memperkuat pemahaman dan praktik nilai-nilai Pancasila karena hal ini akan membantu bangsa menjaga persatuannya di tengah perubahan sosial yang sedang berlangsung.

Kata Kunci: Pancasila, Toleransi, Persatuan Bangsa, Konflik Sosial

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Keberagaman tersebut menjadi ciri khas bangsa Indonesia sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan dan keharmonisan kehidupan sosial. Dalam konteks tersebut, Pancasila berperan sebagai dasar negara sekaligus ideologi nasional yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan konstitusional, tetapi juga sebagai pedoman moral untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang plural (Azidjah, 2025).

Nilai-nilai Pancasila mencakup prinsip-prinsip dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip itu menjadi dasar dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati perbedaan antar orang. Dalam situasi banyak agama di Indonesia, Pancasila membantu mendorong sikap saling menghargai antarumat beragama, sehingga terjadinya perselisihan social bisa diurangi. Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan bisa membentuk masyarakat yang selaras dan menghargai persatuan tanah air (Diniah, 2024).

Selain itu, nilai toleransi juga berkaitan erat dengan sila pertama dan sila ketiga Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Persatuan Indonesia”. Kedua sila tersebut menekankan pentingnya sikap saling menghormati dalam perbedaan keyakinan serta menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, masyarakat diharapkan mampu membangun kehidupan sosial yang damai dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang latar belakang agama maupun budaya (Sakinah, 2025)

Namun di kehidupan sosial sehari-hari, nilai-nilai tersebut tidak selalu berjalan dengan sempurna. Dalam beberapa situasi, masih ada perdebatan-perdebatan yang terkait dengan isu keberagaman, terutama dalam hubungan antaragama. Salah satu isu yang menarik perhatian masyarakat adalah kontroversi terkait penutupan toko kecil yang menjual daging babi di Kota Medan pada tahun 2026. Peristiwa ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat karena berkaitan dengan isu toleransi, kebebasan berusaha, serta penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dalam masyarakat yang heterogen. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi berbagai tantangan. Sebab itu, perlu dipertimbangkan kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila masih relevan dalam mempertahankan persatuan bangsa di tengah perubahan dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan menganggap polemik tersebut sebagai studi kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana Pancasila berperan sebagai dasar persatuan dalam sejarah bangsa Indonesia serta bagaimana nilai toleransi dan keberagaman yang terkandung di dalamnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga membahas urutan peristiwa perselisihan tentang penutupan warung daging babi di Kota Medan pada tahun 2026, serta menganalisis kasus tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana

Pancasila dapat menjadi cara untuk menyelesaikan konflik sosial, serta peran masyarakat dan pemerintah dalam mempertahankan persatuan bangsa.

Penelitian ini ingin menjelaskan peran Pancasila sebagai dasar persatuan rakyat Indonesia dan menganalisis nilai toleransi serta keragaman yang ada di dalamnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perdebatan mengenai penutupan warung daging babi di Kota Medan pada tahun 2026 dan menganalisisnya dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila, agar dapat memahami peran Pancasila sebagai jawaban dalam menjaga persatuan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau studi literatur. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta sumber berita yang relevan. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep nilai-nilai Pancasila, toleransi dalam masyarakat majemuk, serta dinamika sosial yang terjadi dalam kasus polemik penutupan warung daging babi di Kota Medan tahun 2026. Melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antara teori yang ada dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Metode studi literatur dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan memfokuskan kajian pada analisis terhadap berbagai sumber ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya. Menurut Rahmawati (2023) dalam Jurnal Penelitian Pendidikan, studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk memahami suatu permasalahan secara konseptual dan teoritis. Selain itu, Sari dan Putra (2022) dalam Jurnal Ilmu Sosial menjelaskan bahwa studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena melalui analisis kritis terhadap berbagai hasil penelitian yang telah ada. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan masyarakat Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pancasila sebagai Dasar Persatuan dalam Sejarah Bangsa Indonesia

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mempunyai arti penting dalam sejarah negara ini. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda, namun Pancasila telah berhasil menyatukan perbedaan tersebut menjadi kekuatan yang menciptakan persatuan dan solidaritas. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman ideologis, tetapi juga simbol persatuan nasional yang mengakui keberagaman sebagai kekayaan. Perkembangan Pancasila sepanjang sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ideologi ini tetap relevan di masa perubahan, tantangan politik, dan perbedaan sosial. Pancasila dengan kelima silanya merupakan landasan yang mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia, yang memberikan kekuatan bagi negara dalam keberagaman dan kekuatan menghadapi tantangan global.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai keagamaan atau kebaikan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan hidup bermasyarakat. Bunyi daripada Pancasila itu sendiri yakni, (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila tidak lahir dengan keadaan mendadak atau tanpa persiapan apapun, namun Pancasila melalui berbagai tahap/proses yang begitu panjang. Bangsa Indonesia sendiri lahir sekitar abad ke-4 atau 5 Masehi, pada saat itu juga kerajaan Kutai yang memulai sejarah Bangsa Indonesia. Kerajaan Kutai menjadi salah satu sumber utama yang penting dalam menggali Pancasila dan masuk pada kajian sejarah bangsa Indonesia dalam masa Pancasila Pra Kemerdekaan. Pancasila mengalami berbagai proses mulai dari masa Pancasila Pra Kemerdekaan, Periode Perumusan & Pengesahan Pancasila, dan Era Pasca Kemerdekaan. Selain itu adapun dasar-dasar kebangsaan yang mulai berkembang dalam masyarakat Indonesia, hal ini terlihat dari nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang mengiringinya.

Nasionalisme pun mulai tampak ketika pengaruh kerajaan Islam mulai memudar dan munculnya semangat kemerdekaan pada abad ke-18. Meskipun pengaruh multikultural sangatlah berpengaruh dalam perjuangan bangsa Indonesia, namun masyarakat Indonesia kalau itu mampu mewujudkan daya tampung luar biasa untuk mengintegrasikan berbagai macam suku, tradisi dan budaya. Rasa persatuan mulai muncul karena tokoh-tokoh terpelajar menciptakan berbagai organisasi yang bergerak dalam bidang pergerakan nasional.

Oleh karena itu, muncullah hari Kebangkitan Nasional yang menjadi salah satu fase sejarah penting untuk kelahiran Negara Indonesia dan mulai menciptakan ideologi bangsa. Kemudian dilanjut dengan terbentuknya sumpah pemuda yang sepakat untuk satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air Indonesia. Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia (Luthfiah et al., 2025).

B. Nilai-Nilai Toleransi dan Keberagaman dalam Pancasila

Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk mendorong toleransi dan menghargai keberagaman. Siswa diajarkan untuk melihat perbedaan sebagai sumber kekayaan yang dapat memperkaya kehidupan sosial dan budaya. Melalui pendidikan Pancasila, peserta didik didorong untuk mengembangkan sikap inklusif, saling menghargai, dan menerima perbedaan dalam segala aspek kehidupan. Mereka diajarkan untuk menghormati perbedaan agama, budaya, adat istiadat dan tradisi, serta belajar bersama dalam kerangka dialog yang saling memperkaya. Sila kelima dalam Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", dimana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan sosial tersebut antara lain menghormati kebebasan beragama, mengakui hak-hak individu, dan menjamin semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks toleransi, sila kelima mendorong penghormatan terhadap keragaman agama, budaya, suku, dan latar belakang sosial. Prinsip keadilan sosial meliputi perlakuan yang adil dan sama terhadap semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan yang ada. Dalam praktiknya, sila ini

mendorong inklusivitas, menghormati hak-hak individu, dan menghindari diskriminasi dalam masyarakat. Penghormatan terhadap keberagaman juga terkait dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, antara lain persamaan hak, kebebasan berekspresi, dan pengakuan pluralisme. Sila kelima memberikan landasan yang kuat untuk membangun toleransi, menghargai perbedaan, dan memastikan seluruh warga negara Indonesia dapat hidup berdampingan dalam keberagaman (Saputra et al., 2023).

C. Kronologi dan Latar Belakang Polemik Penutupan Warung Daging Babi di Kota Medan Februari 2026

Konteks Sosial-Demografis Kota Medan

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan karakteristik multietnis dan multireligius yang sangat kental. Kota ini dihuni oleh beragam kelompok etnis, antara lain Batak Toba, Karo, Mandailing, Melayu, Tionghoa, Jawa, dan berbagai suku lainnya yang hidup berdampingan selama puluhan tahun. Keberagaman ini menjadikan Medan sebagai representasi miniatur kebhinnekaan Indonesia, di mana praktik toleransi antaragama dan antaretnis senantiasa diuji dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Dalam konteks keberagaman tersebut, perdagangan daging babi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan tradisi kuliner masyarakat non-Muslim di Medan, khususnya komunitas Batak Kristen dan Tionghoa, selama berpuluh-puluh tahun. Keberadaan pedagang daging babi di pasar-pasar tradisional dan kawasan permukiman di Kota Medan telah lama diterima sebagai bagian dari ekosistem perdagangan yang inklusif.

Penerbitan Surat Edaran Wali Kota Medan (13 Februari 2026)

Polemik ini bermula dari diterbitkannya Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Berdasarkan penelusuran berbagai sumber berita, kronologi peristiwa dapat dirangkum sebagai berikut:

Tanggal	Peristiwa
13 Feb 2026	Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menandatangani Surat Edaran Nomor 500-7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-Halal di Wilayah Kota Medan.
15–20 Feb 2026	Satpol PP melakukan penertiban pedagang daging babi di kawasan Jalan M. Nawih Harahap, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas. Video adu mulut antara pedagang dan petugas Satpol PP viral di media sosial.
21 Feb 2026	Sejumlah pedagang daging babi mengadakan pertemuan di Kantor DPP Horas Bangso Batak (HBB) untuk merespons surat edaran tersebut dan menyatakan penolakan tegas.
22 Feb 2026	Asisten Pemerintahan Kota Medan, Muhammad Sofyan, memberikan klarifikasi bahwa SE (surat edaran) bukan larangan penjualan, melainkan penataan lokasi dan pengelolaan limbah

24–25 Feb 2026	Berbagai elemen masyarakat dan ormas mulai menyuarakan penolakan. Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan terbentuk dan merencanakan aksi demonstrasi.
26 Feb 2026	Sekitar 1.000–2.600 orang berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan. Wali Kota Rico Waas akhirnya menerima perwakilan demonstran dan mengakui kesalahan penerbitan SE. SE diputuskan untuk direvisi dan pedagang babi diizinkan kembali berjualan
7 Mar 2026	Berbagai kalangan akademisi dan pengamat mulai mempublikasikan analisis mengenai polemik komunikasi kebijakan publik dan dampak sosialnya.

Isi dan Substansi Surat Edaran Surat Edaran

Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 yang ditandatangani pada 13 Februari 2026 memuat ketentuan-ketentuan teknis mengenai penataan lokasi penjualan daging non-halal. Berdasarkan laporan media, surat edaran ini diterbitkan dengan latar belakang adanya keluhan masyarakat terkait aktivitas pedagang kaki lima daging non-halal di bahu jalan serta permasalahan pengelolaan limbah berupa darah dan sisa potongan hewan yang dibuang ke saluran drainase. Secara substansi, SE tersebut mengatur larangan berjualan di bahu jalan dan trotoar, kewajiban pedagang untuk beroperasi di lokasi tertutup, serta ketentuan mengenai pengelolaan limbah. Pemerintah Kota Medan berulang kali menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan larangan total terhadap penjualan daging non-halal. Sebagaimana dijelaskan oleh Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Citra Capah: "Intinya tidak ada larangan untuk melakukan penjualan daging berkaki empat ataupun non-halal... yang dilarang itu adalah berjualan di badan jalan." (Kumparan, 22 Februari 2026). Respons Masyarakat dan Eskalasi Konflik

Meskipun pemerintah mengklaim kebijakan tersebut sebatas penataan, sebagian besar masyarakat yang terdampak menafsirkannya sebagai bentuk diskriminasi berbasis agama dan etnis. Beberapa faktor yang memperparah persepsi negatif masyarakat antara lain: (1) framing kebijakan menggunakan istilah 'daging non-halal' yang dinilai sarat muatan keagamaan; (2) adanya tekanan dari ormas Islam tertentu kepada Wali Kota Medan sebagai latar belakang munculnya kebijakan; (3) tindakan penertiban Satpol PP yang dilaksanakan secara sepihak tanpa dialog terlebih dahulu; dan (4) minimnya sosialisasi kebijakan kepada pedagang yang terdampak. Penertiban tersebut disebut-sebut berkaitan dengan adanya dorongan dari kelompok organisasi masyarakat (ormas) Islam tertentu kepada Wali Kota Medan, Rico Waas, agar melarang perdagangan daging babi di pinggir jalan dengan alasan keagamaan (Aktualdetik, 21 Februari 2026).

Kondisi ini memicu polarisasi di kalangan masyarakat Medan yang sejatinya telah lama hidup berdampingan secara harmonis. Ketua GAMKI Kota Medan, Boydo HK Panjaitan, menegaskan dimensi ekonomi yang terdampak dari kebijakan ini: "Persoalan ini berkaitan dengan mata pencaharian pedagang, bukan urusan ibadah atau kegiatan keagamaan. Para pedagang mengandalkan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka." (CerminDemokrasi, 27 Februari 2026)

Puncak dari polemik ini terjadi pada 26 Februari 2026, ketika sekitar seribu hingga dua ribu enam ratus orang yang tergabung dalam Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis. Massa aksi berasal dari berbagai elemen, termasuk Horas Bangso Batak (HBB), GAMKI, Pemuda Batak Bersatu (PBB), serta perwakilan masyarakat adat Batak Toba, Karo, dan Nias. Demonstrasi sempat memanas ketika Wali Kota Rico Waas tidak kunjung menemui demonstran. Namun, momen penting terjadi ketika Ketua Umum HBB Lamsiang Sitompul meminta massa untuk menjaga ketertiban: "Tolong hargai dan hormati saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Jangan ada pelemparan dalam bentuk apa pun." (Tempo, 26 Februari 2026).

Seruan ini mencerminkan semangat toleransi yang masih hidup di kalangan demonstran sendiri, meskipun tengah melakukan aksi protes. Setelah negosiasi yang berlangsung lebih dari dua jam, Wali Kota Rico Waas melalui Asisten Pemerintahan M. Sofyan mengakui adanya kesalahan dalam penerbitan SE tersebut dan berkomitmen untuk merevisinya. Pedagang daging babi pun diperbolehkan kembali berjualan seperti semula sambil menunggu proses penyempurnaan kebijakan. Suci Lestari Br Ginting dari Suara USU (2026) merangkum hakikat persoalan ini dengan tepat: "Polemik penjualan daging babi di Medan tidak hanya berkaitan dengan persoalan perdagangan semata, tetapi juga mencerminkan pentingnya komunikasi kebijakan publik yang efektif... keberagaman yang dimiliki masyarakat Kota Medan dapat tetap terjaga sebagai kekuatan sosial yang mendukung kehidupan bersama yang harmonis." (Suara USU, 7 Maret 2026).

D. Analisis Kasus Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Polemik penutupan warung daging babi di Kota Medan 2026 merupakan ladang analisis yang kaya untuk mengukur implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Analisis berikut akan menelaah kasus ini melalui perspektif masing-masing sila Pancasila. 4.1 Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa Jaminan Kebebasan Beragama Sila Pertama Pancasila bukan hanya menegaskan pengakuan terhadap Tuhan, melainkan juga menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya. Dalam konteks kasus Medan, terdapat ketegangan yang perlu dicermati: di satu sisi, ada kelompok yang menggunakan argumen keagamaan (kesucian bulan Ramadan dan norma kehalalan) untuk mendorong pembatasan penjualan daging babi; di sisi lain, komunitas non-Muslim melihat kebijakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak mereka untuk menjalankan tradisi kuliner dan ibadah yang berkaitan dengan konsumsi daging babi. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur akademik, nilai-nilai Pancasila mengajarkan bahwa toleransi antar umat beragama bukan hanya sikap pasif menerima perbedaan, melainkan sebuah kesadaran aktif untuk menghormati hak orang lain: "Toleransi bukan saja didefinisikan sebagai sikap namun juga sebagai kesadaran dan cara berpikir yang memaksa kemauan diri untuk menerima dan menghormati perbedaan." (Salsabila dkk., 2025, hlm. 3, mengutip Shofa, 2022:673)

Seorang warga Medan dalam kritiknya terhadap desakan penutupan warung babi menyatakan bahwa puasa merupakan kewajiban individu, bukan alasan untuk membatasi usaha orang lain, sembari mengingatkan pentingnya saling menghormati di tengah keberagaman. Argumen ini sejalan dengan prinsip Sila Pertama yang menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinan masing-masing, sebagaimana diamanatkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kesetaraan Hak Ekonomi Sila Kedua menuntut perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap setiap manusia tanpa diskriminasi. Dalam kasus ini, aspek kemanusiaan yang paling terdampak adalah hak ekonomi para pedagang daging babi yang selama puluhan tahun telah menggantungkannya dari usaha tersebut. Ketua Gerakan Pedagang Babi Indonesia, Heri Ginting, mengungkapkan bahwa akibat penertiban berbasis SE tersebut, penjualan daging babi merosot tajam, sementara ia dan keluarganya menggantungkannya hidup dari usaha ini (MedanBisnisDaily, 26 Februari 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak sensitif terhadap dimensi kemanusiaan dapat berujung pada pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Praktisi hukum Feri Sibarani, S.H., M.H., menilai persoalan tersebut harus diuji dari perspektif konstitusi, mengingat sejumlah pedagang menyatakan bahwa langkah penertiban tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip persamaan hak dan kebebasan berusaha (Aktualdetik, 21 Februari 2026).

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Ancaman terhadap Kohesi Sosial Sila Ketiga Pancasila merupakan sila yang paling langsung terkait dengan dinamika kasus ini. Polemik yang bermula dari sebuah surat edaran teknis berkembang menjadi isu identitas etnis dan agama yang mengancam kohesi sosial masyarakat Medan. Dari perspektif akademis, para ahli menegaskan bahwa Sila ketiga Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan agama, budaya, dan etnis bukanlah penghalang untuk hidup bersama. Namun, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila yang sering kali menyebabkan munculnya sikap sektarian dan intoleransi (Jurnal Keadilan Hukum dan Kesejahteraan Sosial, 2024).

Ketua Umum Forum Bangso Batak Indonesia, Feber Manalu, bahkan memperingatkan bahwa jika kebijakan ini tidak segera dikaji ulang, maka bukan tidak mungkin akan memicu ketegangan horizontal di tengah masyarakat yang selama ini hidup dalam keberagaman (JAPOS.CO, 24 Februari 2026). Peringatan ini sejalan dengan temuan Hanif (2019) bahwa Pancasila harus berfungsi sebagai manajemen konflik yang mampu mencegah eskalasi perbedaan menjadi benturan fisik antarkomunitas. Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan daya tahan nilai persatuan itu sendiri.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Prinsip Musyawarah dalam Penyelesaian Konflik Sila Keempat menekankan pentingnya musyawarah dan dialog demokratis sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Kasus Medan menunjukkan kegagalan awal dalam menerapkan prinsip ini kebijakan diterbitkan dan dieksekusi tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terdampak. Hal ini berimplikasi pada munculnya resistensi masif dari masyarakat. Dailyklik.id (7 Maret 2026) mencatat bahwa kasus ini memperlihatkan betapa rentannya kebijakan publik ketika komunikasi politik dan desain implementasinya tidak dipersiapkan dengan matang. Sementara itu, Pemerintah Kota Medan menegaskan bahwa kebijakan ini bukan pelarangan, melainkan penataan; namun pertanyaan mendasar tentang prosedur implementasi yang partisipatif tetap belum terjawab. Resolusi yang akhirnya tercapai pada 26 Februari 2026 ketika Wali Kota mengakui kesalahan dan menerima masukan dari perwakilan demonstran justru menjadi contoh implementasi Sila Keempat yang terlambat namun berhasil.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dimensi Keadilan Kebijakan Publik Sila Kelima menuntut distribusi keadilan yang merata dan tidak diskriminatif. Dalam kasus ini, aspek keadilan dipertanyakan pada dua hal: (1) apakah regulasi yang diterapkan hanya menysasar satu kelompok pedagang saja; dan (2) apakah prosedur pembuatan dan implementasi kebijakan sudah berjalan adil. Kritik paling tajam dari para demonstran justru menyentuh dimensi keadilan ini. Pertanyaan retorik dari peserta demonstrasi Effendi Naibaho "Kalau hendak menata pedagang daging, kenapa surat edaran itu hanya menysasar pedagang daging babi (non-halal)?" mencerminkan persepsi ketidakadilan yang dirasakan komunitas terdampak (Tempo, 26 Februari 2026). Ketua GAMKI Boydo Panjaitan juga menegaskan bahwa penataan seharusnya berlaku untuk semua pedagang daging, termasuk pedagang ayam, bukan hanya pedagang daging non-halal. Dari perspektif akademis, Digdoyo (2018) menegaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa yang majemuk, nilai-nilai toleransi beragama harus diimplementasikan secara konsisten tanpa memandang latar belakang kelompok tertentu.

E. Pancasila sebagai Solusi dalam Mengatasi Konflik Sosial di Masyarakat

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, serta latar belakang sosial yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan potensi konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dapat muncul karena perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan agama, serta adanya sikap intoleransi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu nilai dasar yang mampu menjadi pedoman bersama dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial tersebut. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Pancasila memiliki peran penting sebagai solusi dalam mengatasi konflik sosial di masyarakat (Yasila & Ulfatun, 2022).

Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai fundamental yang dapat menjadi pedoman dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu masyarakat dalam menghargai perbedaan, membangun toleransi, serta menjaga hubungan yang baik antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila mampu menciptakan suasana sosial yang harmonis dan mengurangi potensi konflik yang terjadi di masyarakat (Dinia et al., 2024).

Salah satu nilai penting dalam Pancasila yang berkaitan dengan penyelesaian konflik sosial adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan pentingnya menghormati martabat manusia serta menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan konflik melalui cara-cara yang damai, seperti dialog, musyawarah, serta sikap saling menghargai. Selain itu, nilai persatuan Indonesia juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan yang ada. Nilai ini menekankan bahwa setiap warga negara harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok (Dinia et al., 2024).

Dalam kaitannya dengan judul penelitian ini, polemik penutupan warung daging babi di Kota Medan pada tahun 2026 dapat dipahami sebagai contoh konflik sosial yang muncul akibat perbedaan pandangan dan sensitivitas agama dalam masyarakat. Situasi seperti ini menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik secara bijaksana. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan masyarakat untuk saling menghormati keyakinan dan praktik keagamaan masing-masing, sedangkan nilai kemanusiaan mengajarkan pentingnya menghargai hak setiap individu dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dapat membantu masyarakat dalam mengelola perbedaan secara bijaksana sehingga konflik sosial dapat diminimalkan dan persatuan bangsa tetap terjaga.

F. Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Menjaga Persatuan Berdasarkan Nilai Pancasila

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Dalam negara yang memiliki keberagaman seperti Indonesia, persatuan tidak dapat terwujud tanpa adanya kesadaran kolektif untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga persatuan melalui sikap toleransi, saling menghargai, serta menghormati perbedaan yang ada di lingkungan sosial. Sikap toleransi memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam kehidupan sosial, masyarakat diharapkan mampu menghindari tindakan diskriminasi, kekerasan, maupun sikap intoleransi yang dapat memicu konflik antar kelompok. Dengan menerapkan nilai kemanusiaan dan persatuan yang terdapat dalam Pancasila, masyarakat dapat menciptakan hubungan sosial yang harmonis serta memperkuat rasa persaudaraan di antara sesama warga negara (Dinia et al., 2024).

Selain masyarakat, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan bangsa. Pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan yang adil, melindungi hak-hak seluruh warga negara, serta memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi serta memberikan ruang bagi seluruh kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan nasional.

Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa adalah melalui pendidikan. Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan persatuan kepada generasi muda. Melalui pendidikan tersebut, generasi muda diharapkan mampu memahami pentingnya menjaga keberagaman serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila juga menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran kewarganegaraan serta memperkuat identitas nasional di tengah masyarakat yang beragam (Fadhila et al., 2026)

Dalam konteks polemik penutupan warung daging babi di Kota Medan tahun 2026, peran masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mencegah konflik yang lebih luas. Masyarakat perlu mengedepankan sikap toleransi dan saling menghormati, sementara pemerintah harus bertindak secara bijaksana dengan mempertimbangkan nilai keadilan, persatuan, serta perlindungan hak seluruh warga negara.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga. Pancasila menjadi benteng utama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan sosial yang muncul akibat keberagaman masyarakat.

4. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah dibahas, bisa disimpulkan bahwa Pancasila memainkan peran yang sangat penting sebagai dasar persatuan dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejak diresmikan pada tahun 1945, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga berperan sebagai pedoman moral dan ideologi. Pancasila membantu menjaga keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, merupakan dasar penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai serta saling menghargai perbedaan antar individu. Perdebatan tentang penutupan toko daging babi di Kota Medan pada tahun 2026 menunjukkan bahwa di tengah masyarakat yang beragam, perbedaan dapat menciptakan masalah jika tidak dikelola dengan tepat. Peristiwa tersebut menggambarkan bagaimana perbedaan kepentingan, sensitivitas agama, serta kebijakan publik yang kurang efektif dalam komunikasi dapat menyebabkan ketegangan dalam masyarakat. Namun dengan menganalisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila, terlihat bahwa cara menyelesaikan konflik sosial sebaiknya didasari dengan prinsip toleransi, berdialog, bermusyawarah, serta menghormati hak setiap warga negara tanpa ada diskriminasi. Oleh karena itu, Pancasila tetap relevan sebagai penjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan sosial yang ada di era modern. Implementasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten oleh masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menjaga keharmonisan kehidupan sosial serta memperkuat persatuan nasional. Dengan menjaga sikap toleran, adil, dan menghargai perbedaan, Pancasila bisa tetap menjadi dasar dalam menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan bersatu.

DAFTAR REFERENSI

- Aktualdetik. (2026, 21 Februari). Larangan jual daging babi berpotensi rugikan warga, walikota Medan saatnya digugat, dan tidak layak. Aktualdetik.com. Aktualdetik.com. <https://www.aktualdetik.com/berita/14789/larangan-jual-daging-babi-berpotensi-rugikan-warga-walikota-medan-saatnya-digugat-dan-tidak-layak-.html>
- CerminDemokrasi. (2026, 25 Februari). Surat edaran wali kota Medan diprotes, dinilai diskriminatif. CerminDemokrasi.com.

- <https://www.cermindemokrasi.com/2026/02/25/surat-edaran-wali-kota-medan-diprotes-dinilai-diskriminatif/>
- CerminDemokrasi. (2026, 27 Februari). Pedagang daging babi di Kota Medan terdampak atas kebijakan wali kota. CerminDemokrasi.com. <https://www.cermindemokrasi.com/2026/02/27/pedagang-da-ging-babi-di-medan-terdampak-kebijakan-pemkot/>
- Dailyklik.id. (2026, 7 Maret). Menata atau mengusir: Polemik penjualan daging babi di satu tahun pemerintahan walikota Medan. Dailyklik.id. <https://www.dailyklik.id/2026/03/07/menata-atau-mengusir-polemik-penjualan-daging-babi-di-satu-tahun-pemerintahan-walikota-medan/>
- Digdoyo, E. (2018). Kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab sosial media. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 42–59. Azidjah, F. N., Maulana, R., & Fauzi, A. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1256–1263.
- Dinia, A., Nurul, I., Fauzi, A., & Maulana, R. (2024). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN TOLERANSI DAN PERDAMAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 131–142.
- Fadhila, S., Hasan, S., Yahya, N. A., & Kadir, M. I. (2026). Peran Pendidikan Pancasila dalam Menjaga Persatuan di Tengah Keberagaman. *Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 01(03), 1338–1345.
- Hanif, H. A. (2019). Pancasila sebagai manajemen konflik antar umat beragama di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 1(2), 117–133.
- JAJOS.CO. (2026, 24 Februari). Ketua Umum FBBI desak wali kota Medan cabut surat edaran larangan penjualan daging babi, dinilai diskriminatif dan picu gejolak sosial. JAJOS.CO. <https://www.jajos.co/2026/02/24/ketua-umum-fbbi-desak-wali-kota-medan-cabut-surat-edaran/>
- Kumparan. (2026, 22 Februari). Penjelasan Pemko Medan soal surat edaran larangan penjualan daging babi. Kumparan.com. <https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-pemko-medan-soal-surat-edaran-larangan-berjualan-daging-babi-26seB7p2hS3>
- Luthfiah, R. W., Herawati, H., & Gustaman, R. F. (2025). PERKEMBANGAN PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA. 3(1), 30–37.
- MedanBisnisDaily. (2026, 26 Februari). Wali kota Medan Rico Waas akui salah: Pedagang daging babi kembali bebas berjualan, SE daging nonhalal direvisi. MedanBisnisDaily.com. <https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2026/02/26/197538/>
- Pemerintah Kota Medan. (2026, 13 Februari). Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-Halal di Wilayah Kota Medan. Pemerintah Kota Medan

- Rahmawati, D. (2023). Metode studi literatur dalam penelitian pendidikan: Kajian konseptual dan penerapannya. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 15(2), 120–128.
- Sakinah, A., Kusuma, R. P., & Saputra, A. R. (2025). Toleransi antar umat beragama dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 45–52.
- Salsabila, T. S., dkk. (2025). Ideologi Pancasila dalam toleransi antar umat beragama. *International Journal of Education and Digital Research (IJEDR)*, 3(2).
- Saputra, A. G., Juliansyah, S. C., & Athayla, S. (2023). Pendidikan Pancasila dalam Era Multikulturalisme : Membangun Toleransi dan Menghargai Keberagaman. 1(5), 573–580.
- Sari, M., & Putra, A. (2022). Studi pustaka sebagai metode penelitian dalam kajian ilmu sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 45–53.
- Suara USU. (2026, 7 Maret). Polemik penjualan daging babi di Medan: Penataan kota vs pedagang. *SuaraUSU.or.id*. <https://suarausu.or.id/polemik-penjualan-daging-babi-di-medan-penataan-kota-vs-pedagang/>
- Tempo. (2026, 26 Februari). Pedagang daging babi di Medan demo tolak SE wali kota. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/pedagang-daging-babi-di-medan-demo-tolak-se-wali-kota-2118124>
- Tribun Medan. (2026, 24 Februari). Rencana aksi unjuk rasa menolak surat edaran penjualan daging non-halal di Medan. *Tribun-Medan.com*. <https://medan.tribunnews.com/news/1783017/rencana-aksi-unjuk-rasa-menolak-surat-edaran-penjualan-daging-non-halal-di-medan>
- Yasila, K., & Ulfatun, F. (2022). PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN DI TENGAH PLURALITAS MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal Global Citizen*, 1.